



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI
Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 15 April 2015
Waktu : 19.30 – 22.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan : Kepala Badan Nasional Penanggulanagan Bencana
Acara : Rencana Strategis RPJM BNPB dalam rangka memahami pembahasan APBN 2016
iKetua Rapat : **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH
Hadir : 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Rabu, 15 April 2015 dibuka pukul 19.30 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. **Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.**, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta berbagai hal yang terkait dengan Rencana Strategis RPJM BNPB dalam rangka memahami pembahasan APBN 2016.

II. PEMBAHASAN

- I. Dasar Pelaksanaan Rapat Kerja
- II. Pengelolaan Risiko Bencana
- III. Agenda Pembangunan RPJMN 2015-2019
- IV. Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019

V. Strategis RPJMN 2015-2019

VI. Rencana Strategis BNPB 2015-2019

VII. Tujuan dan Sasaran Strategis BNPB 2015-2019

VIII. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2015-2019

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda "**Rencana Strategis RPJM BNPB dalam rangka Memahami Pembahasan APBN 2016**", maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala BNPB tentang Rencana Strategis RPJMN 2015-2019 dan meminta untuk menyempurnakannya sesuai masukan anggota Komisi VIII DPR RI.
2. Terkait dengan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam RPJMN, Komisi VIII DPR RI memberikan beberapa pandangan dan pendapat yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:
 - a. BNPB perlu terus melanjutkan penyusunan peta indeks risiko bencana skala 1:50.000 pada tingkat kabupaten dan skala 1:25.000 pada tingkat kota.
 - b. BNPB meningkatkan koordinasi dengan K/L dan Pemda agar peta risiko bencana menjadi dasar dalam penyusunan RTRW dan dasar pengambilan keputusan Rencana Aksi daerah (RAD).
 - c. Perlunya sosialisasi Rencana Strategis BNPB agar sejalan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana.
 - d. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah/BPBD dalam berbagai kebijakan penanggulangan bencana.
 - e. Meningkatkan berbagai kegiatan penelitian terkait penanggulangan bencana dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang hasilnya dipublikasikan secara luas.
- f. Untuk menjamin mutu dan kelangsungan program, maka perlu ditetapkan standar kompetensi Pimpinan BPBD beserta jajarannya.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan Kepala BNPB tentang alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi minimal sebesar 1% dari APBN dan khusus untuk DSP dialokasikan setiap awal tahun anggaran.
4. Dalam rangka perwujudan RPJMN BNPB, maka perlu melakukan penguatan kepada elemen-elemen prioritas strategis seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan.
5. Untuk alokasi anggaran BNPB akan konsisten dengan visi, misi strategi yang fokus kepada pengurangan risiko bencana dengan berbasis kepada empat program BNPB yang sudah ditetapkan dengan membuka peluang relokasi serta penambahan item program.

Rapat ditutup pukul 22.00 WIB

Jakarta, 15 April 2015

AN.KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001